

Judul : DPR tagih komitmen pemerintah
Tanggal : Jumat, 22 Januari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

DPR Tagih Komitmen Pemerintah

Jika kebijakan telah diteken Presiden harus langsung dijalankan dan tidak kembali lagi pada pembahasan.

FAUSTINUS NUA

faustinus@mediaindonesia.com

KOMITMEN pemerintah untuk membenahi lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang ada di bawah kementerian/lembaga dipertanyakan DPR. Pasalnya, pascapengesahan UU pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2019 dengan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) sebagai kepala atau koordinaturnya, proses integrasi belum juga berjalan. Integrasi lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangirap) ke dalam BRIN masih menemui jalan buntu.

Anggota Komisi VII DPR-RI Ridwan Hisjam mengata-

kan, BRIN seharusnya sudah berjalan dan proses integrasi litbangirap ke dalamnya pun tidak perlu memakan waktu yang lama. "Apabila sudah ditandatangani (Presiden) harusnya langsung dinomori untuk dilaksanakan, tidak dibahas lagi. Tidak boleh dibahas lagi, itu sudah selesai, undang-undang sudah selesai," ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Politikus senior Partai Golkar itu menyampaikan Komisi VII pun sudah menanyakan progres pembentukan BRIN. Sekarang tinggal menanti keseriusan pemerintah untuk menjalankan perintah UU tersebut.

"Ttu makanya kemarin pada saat rapat Komisi VII dengan Pak Menteri (Ristek) kita minta

"Kalau sudah diteken Presiden, itu langsung jalan. Tidak ada sudah diteken Presiden nanti kembali bahas, itu tidak ada."

Ridwan Hisjam

Anggota Komisi VII DPR-RI

mana BRIN-nya. Sudah ada Menteri Ristek/Kepala BRIN, tapi Kepala BRIN-ya belum berfungsi karena belum ada organnya," kata dia.

Dia menegaskan bila di dalam pemerintahan ada tarik-menarik soal kebijakan, hal itu merupakan masalah internal yang bisa diselesaikan Presiden. Namun, terkait dengan amanat UU hal itu sudah seharusnya

dijalankan, apalagi dalam perpres sudah ditandatangani Presiden sendiri. "Kalau sudah diteken Presiden, itu langsung jalan. Tidak ada sudah diteken Presiden nanti kembali bahas, itu tidak ada. Berarti terjadi pembangkangan kalau tidak dilaksanakan," ucapnya.

Fungsional

LIPI telah menyiapkan enam Jabatan Fungsional (JF) baru untuk mengakomodasi aktivitas riset selaras dengan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. "Jabatan fungsional baru ini melengkapi Jabatan Fungsional Peneliti yang sudah ada sebelumnya, diharapkan jabatan fungsional baru tersebut dapat menaungi spektrum aktivitas *kepenelitian* riset yang lebih luas," ujar Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, dalam keterangan resmi, kemarin.

Handoko mengungkapkan

jabatan fungsional baru diharapkan menjadi wadah pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme, serta mendorong motivasi ASN dalam berkontribusi bagi bangsa Indonesia.

Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas mengatakan dengan adanya JF baru tersebut akan lebih memotivasi ASN. "ASN di lembaga penelitian dapat berkariernya sesuai dengan kompetensi dan minat untuk memajukan riset dan inovasi di Tanah Air," jelas Nur.

Dia menambahkan, proses selanjutnya setelah disetujuinya enam JF baru ini oleh Kemenpan-Rebiro, LIPI sebagai instansi pembina menindaklanjuti dengan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaannya. Nantinya, jabatan fungsional ini akan terbuka bagi seluruh ASN sehingga dapat menjadi alternatif karier bagi ASN yang ditugaskan di berbagai lembaga dan unit penelitian. (H-3)